



Laporan Penelitian

KAMPANYE PEMILU DALAM PERS: ANALISIS ISI BERITA-BERITA KAMPANYE PEMILU 1997 DALAM PERS DAERAH JAWA TENGAH DAN DIY

Oleh:

Drs. JOYO NURSURYANTO GONO, Msi

Drs. HEDI PUJO SANTOSA

Dra. ENDAH MURWANI, Msi

Drs. ADI NUGROHO

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian tanggal 4 Agustus 1997
Nomor: 3157/PT09.H2/N/1997.

PERSONALIA

KETUA

N A M A : Drs. JOYO NUR SURYANTO GONO, MSi
NIP : 131 657 345
GOL/Jabatan : III a/Asisten ahli
Keahlian : Ilmu Komunikasi

ANGGOTA

N A M A : Drs. HEDI PUJO SANTOSA
NIP : 131 832 251
GOL/Jabatan : III b/ ASISTEN AHLI
Keahlian : Ilmu Komunikasi

ANGGOTA

N A M A : Drs. ADI NUGROHO
NIP : 132 070 186
GOL/Jabatan : III a/ASISTEN AHLI MADYA
Keahlian : Ilmu Komunikasi

ANGGOTA

N A M A : Dra. ENDAH MURWANI MSi
NIP : 131
GOL/Jabatan : III a/ASISTEN AHLI MADYA
Keahlian : Ilmu Komunikasi

ABSTRAK:

Beranjak dari pengalaman bahwa setiap menjelang pemilu, terdapat dua hal yang bertolak belakang. Di satu pihak pers merupakan media yang diharapkan menjadi pelopor kemajuan demokrasi, melalui pemberitaan politik kepada masyarakat. Tetapi dipihak lain, pemerintah justru merasa ketakutan dengan kekuatan media pers atas dampak yang mungkin timbul dan merugikan penguasa.

Peningkatan suhu politik pada masa kampanye, dapat diketahui dari media pers yang memberitakan kejadian kampanye pemilu ketiga OPP sejak awal kampanye dimulai hingga kampanye selesai. Di Jawa tengah dan DIY, peristiwa politik menjelang pemilu nampak sekali berpengaruh pada kegiatan kampanye. Walaupun demikian pemerintah merasa berwenang mencampuri urusan pers dengan pembatasan-pembatasan pemberitaan. Hal ini membawa konsekuensi kemungkinan kecenderungan pers dalam memberitakan kegiatan kampanye OPP memihak kepada kepentingan partai pemerintah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil masalah penting dalam bidang ilmu komunikasi politik adalah apakah dengan berbagai regulasi yang diberikan pihak berwenang menjelang kampanye berlangsung, pers daerah dominan di Jawa Tengah dan DIY kehilangan independensi dalam pemberitaan? Pokok masalah penelitian ini bukan melihat dampak media pada khalayak, tetapi lebih menekankan bagaimana media menyajikan liputan berita, khususnya berita tentang politik sepanjang masa kampanye pemilu 1997 dari tiga surat kabar yang terbit di Jawa Tengah-DIY yaitu: Bernas, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka? Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Populasi: Berita kampanye pemilu 1997 Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Bernas.

ABSTRACT:

Two antagonistic dimensions between the press and government interests always be problem about pre-election campaign in Indonesia. The press will be so much pioneer to increase democratic life about media political exposure to public. But, the government take care to media power impact that will be decreased government credibility.

Political information in the press media well increase, so much political event about political party campaign from beginning to the end of political campaign period. In Jawa Tengah and DIY political events before campaign manifest in newspaper and influence to campaign activity. And the government involvement with its authority to the press affairs, it restricts the press freedom to communicate. Is the press policy changes one to cooptation with the government policy or the independence keep well ?

The study problem about political communication science that is media content along election campaign 1997 independence? And with content analysis method, this study will be take characteristic of the political information.

KATA PENGANTAR

Berkah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekuatan utama dalam menyelesaikan pekerjaan penelitian ini, dari mulai tahap awal hingga pembuatan laporan yang selesai tepat pada waktu yang ditentukan. Laporan penelitian mengalami sedikit hambatan karena proses menunggu dana yang sedikit mundur, sehingga pelaksanaannya juga mengalami kemunduran. Proses "coding" yang membutuhkan waktu dan tenaga relatif banyak, untuk dapat mengejar batas waktu penyerahan laporan yang ditetapkan.

Walaupun demikian berkat bantuan berbagai pihak akhirnya laporan ini selesai dengan tidak menutup kemungkinan banyak kelemahan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: Kepala Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Dekan Fisip Undip, Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Undip atas semua dukungan yang diberikan. Triyono Lukmantoro, S.Sos, Elly Burhaini, S.Sos, Amin Tri Rahayu, Doni Mariantono, S.Sos, yang telah membantu team peneliti melakukan "Coding".

Laporan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan untuk itu kami mohon berbagai saran agar di kemudian hari dapat lebih baik. Terima kasih.

Semarang, Januari 1998

Team Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Personalia	iii
Abstrak	iv
Abstrack	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Bab I : Pendahuluan	1
I. Latar Belakang	1
II. Permasalahan	3
III. Tujuan & Manfaat	3
IV. Kerangka Teori	4
V. Metode	11
Bab II : Riwayat Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Bernas	13
Bab III : Hasil Penelitian	19
Bab IV : Wacana Berita Kerusuhan, Fenomena PDI & Mega Bintang	30
Bab V: Penutup	43
Daftar Pustaka	45

DAFTAR TABEL

	hal.
TABEL 1 : Menampakkan sikap loyal/fanatik OPP thd Pemerintah	20
TABEL 2 : Menampakkan sikap loyal/fanatik thd seorang tokoh	20
TABEL 3 : Menampakkan sikap loyal/fanatik massa thd OPP	21
TABEL 4 : Menampakkan program OPP	21
TABEL 5 : Menampakkan peristiwa seremonial	21
TABEL 6 : Menimbulkan citra Positif OPP tertentu	22
TABEL 7 : Menimbulkan citra negatif OPP tertentu	22
TABEL 8 : Menonjolkan kerusuhan politik kampanye	23
TABEL 9 : Cenderung memihak OPP	23
TABEL 10 : Menampakkan sifat loyal/fanatik OPP thd Pemerintah	24
TABEL 11 : Menampakkan sifat loyal/fanatik OPP thd tokoh	24
TABEL 12 : Menampakkan sifat loyal/fanatik massa thd OPP	25
TABEL 13 : Menampakkan kerusuhan kampanye	25
TABEL 14 : Menampakkan ketidakpuasan OPP	26
TABEL 15 : Menampakkan gugatan OPP atas penyelenggaraan pemilu	26
TABEL 16 : Menampakkan dukungan pemerintah thd OPP tertentu	27
TABEL 17 : Menampakkan dukungan arus bawah terhadap OPP tertentu	27
TABEL 18 : Cenderung menonjolkan seremonial	27
TABEL 19 : Menonjolkan program partai	28
TABEL 20 : Menampakkan keberhasilan program OPP tertentu	28
TABEL 21 : Menampakkan tekanan pihak keamanan thd OPP itu	29

TABEL 22 : Menampakkan reaksi OPP atas tekanan pihak Keamanan	29
---------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Setiap masa kampanye pemilu, sejak pemilu awal orde baru, peran pers selalu menjadi pusat perhatian pemerintah dan pihak keamanan. Pada Pemilu 1977 yang lalu, melalui hasil penelitian, Ridwan menunjukkan bahwa terdapat 3 posisi penting dari pers yaitu:

Pertama, pers hanya akan bertindak sebagai wasit dan tidak ikut menentukan politik OPP. Dalam hal ini pers harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Berita-berita harus didasarkan fakta dan komentar yang sesuai dalam tajuk rencana.

Kedua, pers tidak diijinkan melaporkan panjang lebar mengenai aktifitas kampanye secara khusus. Hal ini untuk menghindari kontroversi yang dapat mengundang polemik tanpa akhir sehingga memungkinkan munculnya kerawanan sosial dan keamanan.

Ketiga, pers dapat digunakan untuk kampanye atas permintaan OPP, sehingga peran politik praktis yang menonjol dan menguntungkan salah satu OPP (Ridwan dalam Flournoy, 1992).

Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa pihak berwenang berpandangan normatif atas peran strategis pers dalam komunikasi politik di Indonesia. Terkandung kekhawatiran akan pengaruh pers terhadap kerawanan sosial, politik dan keamanan pada masa menjelang pemilu, maka menurut persepsi mereka perlu dilakukan regulasi atas pemberitaan yang berkaitan dengan pemilu.

Walaupun perjalanan sejarah orde baru telah mengalami berbagai kemajuan, baik pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, meningkatnya partisipasi politik masyarakat; akan tetapi nampaknya persepsi pemerintah dan pihak keamanan atas peran sosial politik pers belum mengalami perubahan. Tekanan pemerintah atas peran pers, yang semestinya sebagai alat kontrol kekuasaan pemerintah, dilakukan ketika penguasa mengalami desakan partisipasi arus bawah melalui berbagai kegiatan protes atas kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Sehubungan dengan itu, Harsono Suwardi mengungkap bagaimana hubungan pers dan pemerintah dalam pemilu 1987, yang dapat dijadikan indikasi bahwa peran pers dalam

politik di Indonesia belum berpihak pada kehidupan demokrasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

1. Sistem hubungan yang ada selama ini, antara pers dan pemerintah adalah simbiosis mutualistik.
2. Pola hubungan tersebut karena porsi pemberitaan lebih banyak diberikan untuk Golkar dari pada PPP maupun PDI. Akibatnya sifat hubungan antara pemerintah & pers adalah paternalistik, baik pers daerah maupun Ibukota (Harsono Suwardi 1992).

Pada kampanye pemilu 1992, di DIY terjadi aksi protes atas pelarangan penggunaan kendaraan bermotor untuk kampanye. Dan menimbulkan apa yang dikenal "Peristiwa Yogya 1992". Dari analisis wacana yang dilakukan atas berita aksi protes yang dilakukan warga PPP dan PDI yang dimuat dalam surat kabar daerah Kedaulatan Rakyat menunjukkan bahwa terdapat implikasi ideologis yang menunjukkan kecenderungan dukungan terhadap Golkar. Dan melalui pilihan sumber berita serta penggunaan sumber teks untuk kutipan ditemukan bahwa pelaku protes tidak diberikan kesempatan untuk bicara secara luas (JNS Gono dalam Forum 1997).

Berita-berita mengenai tuntutan kehidupan demokrasi yang berasal dari arus bawah, pada menjelang pemilu 1997 saat ini semakin sering. Munculnya Megawati sebagai simbol demokrasi memperluas dukungan arus bawah untuk melakukan berbagai tuntutan. Isu utama di daerah Jawa Tengah dan DIY yang nampak menjadi obyek aksi protes dan membawa dampak politis yang luas, bersamaan menguatnya dukungan terhadap Megawati, antara lain isu kungsiisasi, isu pembangunan rumah dinas Gubernur yang kontroversial, meninggalnya wartawan Bernas Udin dan dikaitkan dengan berita tentang kolusi 1 milyar Bupati Bantul dan Megaproyek Parangtritis.

Peningkatan suhu politik menjelang pemilu dapat dibaca melalui berita-berita di media massa daerah mengenai pawai kendaraan bermotor oleh PPP, yang dilakukan hampir setiap hari di daerah-daerah. Akibat yang ditimbulkannya berupa pemecahan kaca mobil, perkelahian, dan kerawanan sosial yang hampir meluas. Juga meningkatnya kerusuhan di Pekalongan, Banjarnegara., Temanggung, Wonosobo, Banyumas.

Peran strategis pers daerah sekali lagi memperoleh sorotan tajam dari pihak keamanan, bahkan hingga Pangab sendiri mengisyaratkan agar pers membuat berita-berita

yang bertanggung jawab dan tidak membuka peluang untuk meningkatnya gangguan keamanan maupun kerusuhan politik. Walaupun demikian dari gambaran tersebut nampaknya justru menunjukkan fungsi pers sebagai media komunikasi politik amat besar. Dampak dari peringatan-peringatan pihak keamanan terhadap pers itu jelas bahwa fakta berita kadang-kadang tidak ditampilkan secara terbuka, tetapi menggunakan bahasa *eufemisme*, juga kadang-kadang tidak ditampilkan dalam pers demi menjaga ketertiban dan keamanan. Esensi fungsi pers sebagai media komunikasi politik menjadi hilang, sebab pers lebih menonjolkan peristiwa "ceremonial" dan terkesan memihak.

II PERMASALAHAN

Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah yang terdapat dalam pers daerah Jawa Tengah dan DIY. Menurut pengamatan, menjelang pemilu 1997 ini telah muncul berbagai reaksi politik yang diasumsikan dipengaruhi oleh pemberitaan sebagai *headline* pers daerah. Ketika mengalami perbesaran skala imaji politik terhadap berita-berita, yang didukung proksimitas yang tinggi Pers daerah dengan pembacanya, reaksi politik meluas. Tidak heran pihak berwenang melakukan pencegahan melalui *wejangan*, teguran, kunjungan ke perusahaan pers, bahkan peringatan keras terhadap pers yang memberitakan berbagai kerusuhan yang muncul di daerah.

Melalui analisis isi terhadap berita kampanye pemilu 1997, studi ini mempertanyakan apakah dengan berbagai regulasi yang diberikan pihak berwenang menjelang kampanye berlangsung, pers daerah dominan di Jawa Tengah dan DIY kehilangan independensi dalam pemberitaan? Pokok masalah penelitian ini bukan melihat dampak media pada khalayak, tetapi lebih menekankan bagaimana media menyajikan liputan berita, khususnya berita tentang politik sepanjang masa kampanye pemilu 1997 dari tiga surat kabar yang terbit di Jawa Tengah-DIY yaitu: Bernas, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka?

III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Independensi merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh hampir setiap surat kabar. Motto yang dikemukakan sebagai cerminan jiwa isi surat kabar biasanya mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai medium komunikasi politik terkadang

karakteristik demikian tidak dipegang teguh. Karena berbagai pertimbangan editorial yang sangat memungkinkan terjadi perubahan akibat *wejangan* pihak berwenang maupun "pesanan" pemerintah.

Secara tegas penelitian ini bertujuan mengkaji:

- Karakteristik pers daerah Jawa Tengah & DIY yang dominan, melalui liputan berita kampanye pemilu 1997.
- Bagaimana surat kabar menyajikan liputan berita kampanye pemilu 1997, apakah terdapat sistem hubungan yang memungkinkan isi berita tampil dengan kecenderungan memihak OPP, atau pemerintah?

Sedangkan manfaat penelitian adalah :

- Secara teoritik dan metodologi memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan komunikasi khususnya komunikasi politik di Indonesia.
- Akan memberi sumbangan kepada kehidupan pers di Indonesia, dan kehidupan demokrasi melalui saluran pers pada umumnya.

IV KERANGKA TEORITIK

Penelitian mengenai pers di Indonesia belum banyak dilakukan. Pers yang digunakan dalam penelitian ini, adalah istilah pers dalam arti sempit, yaitu seluruh media cetak. Untuk penelitian ini adalah surat kabar saja. Istilah pers dalam arti luas termasuk media elektronik (radio dan televisi) tidak tercakup dalam penelitian ini.

Oemar Seno Aji menulis bahwa media itu banyak macam dan sifatnya (Oemar Seno Aji, 1973). Dalam konteks pers dalam arti sempit, medium ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari arti maupun manfaat pers dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kehadiran surat kabar di tengah masyarakat dapat dipergunakan sebagai indikator mengenai seberapa jauh masyarakat atau kelompok masyarakat sudah bisa membaca maupun menulis (World Communication, Unesco, 1975).

Dalam kaitan ini Harsono Suwardi memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap fungsi media massa dalam proses kehidupan politik. Menurutnya terdapat dua

pandangan normatif yang berbeda: Pertama, media massa diharapkan mampu mengutarakan semua masalah yang oleh masyarakat dianggap penting. Misalnya, media massa harus mampu mengangkat persoalan ke permukaan, sehingga sesuatu yang kurang jelas akan menjadi lebih jelas. Informasi semacam kondisi moneter hingga harga bahan pokok; dan lain-lain. Kedua, walaupun berdampak pada mempersempit ruang gerak peran media dalam kehidupan sehari-hari, tetapi justru media massa dianjurkan untuk lebih selektif dalam mengutarakan masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks kedua ini media mempunyai kecenderungan besar untuk lebih bersikap sebagai "balancer" (penyeimbang) anatar kepentingan media dan kepentingan publik (Harsono Suwardi, 1992)

Sistem pers Indonesia, sejak pemerintahan orde baru menggunakan model kedua. Walaupun pemikiran awal merupakan refleksi atas falsafah tanggung jawab sosial pers. Berlandaskan pada ideologi Pancasila, falsafah tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan diberikan label Sistem Pers Pancasila. Dalam sistem ini ditekankan pada hubungan keseimbangan antara tiga komponen yaitu Pers, Pemerintah dan Publik. Interaksi positif diharapkan mengemuka sebagai wujud tanggung jawab sosial pers atas pemberitaannya. Walaupun dalam prakteknya, independensi pers terhambat oleh peraturan yang dibuat pemerintah, yang bertujuan mengatur arus informasi di dalam masyarakat.

Selanjutnya secara lebih khusus fungsi dari surat kabar bisa dibagi ke dalam fungsi pendidikan (juga pendidikan politik), fungsi sebagai sumber informasi, sebagai fungsi hiburan maupun sebagai pengamat lingkungan (Charles Wright, 1959). Sebagai pengamat lingkungan pers dijadikan sebagai alat kritik sosial. Walaupun demikian penyajian berita yang berfungsi seperti tersebut ditunjukkan dalam bentuk liputan berita, yang sebelumnya melalui proses seleksi oleh *gatekeeper* sebelum surat kabar ini sampai di tangan pembaca (Severin dan Tankard, 1991). Oleh karena itu liputan sebuah berita akan melewati banyak pintu seperti para pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana sebelum memenuhi kebutuhan pembaca.

Gatekeeper ini merupakan agen yang menyampaikan informasi dalam berita kepada calon pembaca yang kebutuhan informasinya relatif memiliki relevansi dengan apa yang dibutuhkan oleh pembaca sendiri. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh para

gatekeeper adalah semua informasi yang sudah mengalami proses penyaringan dan produknya adalah informasi atau berita yang bersifat *non purposive* seperti apa yang diperkirakan akan menjadi kebutuhan para calon pembacanya. *Non purposive* ini berarti pesan-pesan yang disampaikan dengan tidak mempunyai maksud tertentu dari surat kabar. Jadi yang disampaikan adalah suatu fakta informasi. Dengan demikian, maka peran *gatekeeper* adalah pentapis terakhir terhadap keluar masuknya informasi untuk suatu liputan dalam surat kabar (Harsono Suwardi, 1992).

Dalam surat kabar tersaji di dalamnya terutama komponen-komponen berita (*news*). Pengertian berita ini berarti semua informasi yang mempunyai nilai berita dan yang telah ditu-angkan dalam surat kabar. Dengan demikian, semua liputan berita para wartawan yang telah melalui seleksi redaktur pelaksana maupun pemimpin redaktur. Menurut Walseley dan Campbell nilai berita ditentukan oleh 2 faktor yaitu: (a) Faktor determinants (menentukan) dan (b) faktor components (komponen). Sebagai faktor yang menentukan, nilai berita mencerminkan sifat dari berita dengan 5 kriteria:

1. Ketepatan Waktu, merupakan kriteria yang paling penting. Walaupun demikian, untuk setiap media ketepatan waktu tidak akan sama, dan tergantung kepada sifat media masing-masing. Berita yang muncul di surat kabar lain pada hari yang berbeda. Namun berita yang muncul pada hari ini di suatu surat kabar masih bisa muncul dalam majalah berita misalnya. Demikian juga keadannya dengan media elektronik.
2. Kedekatan (*proximity*). Kriteria ini tidak bisa dilepaskan dari unsur ruang atau unsur geografis. Suatu *event* yang terjadi di Jakarta akan lebih penting artinya bagi mereka yang tinggal di Jakarta dari pada mereka yang tinggal di Bandung misalnya. Akan tetapi pemilihan seorang gubernur di Jawa Barat akan mempunyai nilai berita yang tinggi bagi masyarakat Jawa Barat, dari pada bagi masyarakat Jakarta. Dan dalam surat kabar di daerah berita semacam ini akan memenuhi halaman pertama. Walaupun demikian apabila ada suatu pemilihan mengenai siapa yang akan dipilih sebagai pimpinan DPR-RI, maka tidak ada perbedaan antara liputan surat kabar daerah dengan surat kabar ibukota.
3. Dikenal. Dalam kategori ini disebutkan bahwa makin dikenalnya seseorang

dalam suatu *event*, makin mempunyai nilai berita untuk peristiwa tersebut. Umumnya berita semacam ini akan meluas sesuai dengan sifat kedekatannya.

4. **Konsekuensi.** Dalam kategori ini suatu event mempunyai konsekuensi langsung terhadap nilai berita, sehingga suatu peristiwa walaupun tidak begitu menonjol atau bahkan tidak dikenal, bisa saja menjadi dikenal dan mempunyai nilai berita apabila dalam *event* itu dijumpai seorang tokoh penting terlibat di dalamnya. Misalnya suatu bencana alam kecil disuatu kota yang amat terpencil dari keramaian, maka ia akan mempunyai nilai berita apabila dalam bencana tersebut seorang tokoh politik menjadi korbannya.dalamnya.
5. **Human Interest.** Dalam kategori yang terakhir ini tidak lain dimaksudkan adalah bahwa setiap *event* yang dapat menyentuh perasaan manusia atau yang mengundang perhatian seseorang akan mempunyai nilai berita tertentu. Dalam kategori ini yang bisa diangkat sebagai berita adalah yang mempunyai nilai *human interest*, antara lain: peristiwa tentang petualangan, humor, konflik, seks, perasaan sedih atau senang, kejanggalan dan sejenisnya. Hampir dapat dikatakan bahwa setiap hari surat kabar mencoba menampilkan berita yang memiliki unsur *human interest* seperti ini (Harsono Suwardi, 1993).

Sedangkan faktor komponen merupakan bagian dari sesuatu, yaitu bagian dari berita. Jadi komponen berita dengan sendirinya bergantung pada isi berita. Kebutuhan pembaca akan berita surat kabar amat ditentukan oleh selektifitas *gatekeeper* dalam sistem. Secara kultural, surat kabar tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budayanya, karenanya terbentuk sistem hubungan dengan berbagai kualifikasinya.

Penggunaan media surat kabar, seperti halnya media massa lainnya oleh masyarakat merupakan hak berkomunikasi. Oleh karena terkandung nilai kebebasan yang merupakan nilai sosial universal, yang terdiri kebebasan berpendapat, berkumpul, memperoleh informasi. Kebutuhan akan memperoleh informasi belum tentu sesuai dengan keinginan yang mendasarinya. Secara tidak sadar, akses informasi ini telah mengalami berbagai hambatan yang secara sistematis menunda atau membelenggu kebebasan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Isi media surat kabar yang dikomunikasikan tidak terlepas dari performansi media. Sistem sosial politik, kepemilikan media (proprietary) amat berperan secara signifikan mendukung independensi editorial menyusun berita.

Persoalan kebebasan ini telah dikupas oleh *McQuail* dengan mengajukan tiga hipotesis bahwa:

1. Penguasaan sebuah surat kabar oleh kelompok atau saluran nasional mengurangi pelayannya memberikan berita dan pendapat yang sesuai menurut visi surat kabar itu.
2. Hilangnya sebuah surat kabar yang mampu bersaing mengurangi keanekaragaman informasi dan pendapat yang diperlukan pembaca.
3. Berpindahnya kebebasan ke dalam status kelompok (yaitu kedalam status monopoli) mengurangi independensi dan "semangat" editorial sebuah surat kabar (*McQuail*, 1995).

Hipotesis pertama sesuai dengan permasalahan independensi sehubungan dengan implikasi dari isi media di "dikte" oleh kebijakan secara jarak jauh, kebijakan kelompok pemilik yang ternyata dinilai lebih sesuai dari pada kebijakan editorial lokal. Dalam hipotesis kedua, masih berkaitan dengan hipotesis pertama, yaitu memungkinkan interpretasi tingkat keanekaragaman ditampilkan dalam isi media yang keduanya merupakan independensi proses editorial dan merupakan indikator kebebasan, tetapi permasalahannya apabila diversity justru ditemukan di antara judul maupun saluran-saluran yang dimiliki oleh kelompok pemilik yang sama. Hal ini memungkinkan munculnya "homogenitas" yang dapat pula disamakan dengan "konformitas", di sini telah menunjukkan monopoli atau jaringan mata rantai kepemilikan. Sedangkan hipotesis ketiga secara langsung berhubungan dengan "greet" dan aktifitas pekerjaan editorial. Dari sisi ini monopoli kepemilikan media memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap ketidakbebasan editorial menyampaikan fakta berita kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan porsi pada lembaga birokrasi membuka peluang besar bagi kontrol pemerintah terhadap kehidupan pers. Fungsi media pers berubah bukan sebagai "watch-dog" dan kritik bagi pemerintah, tetapi merupakan media kepanjangan tangan kekuasaan pemerintah. Pandangan pers yang berlawanan

dengan pemerintah sudah barang tentu akan menghadapi peraturan perundang-undangan maupun lembaga STUPP. Dengan demikian satu lagi faktor penghambat kebebasan berkomunikasi justru dari pemegang kekuasaan. Contoh kasus berkaitan kontrol pemerintah atas pers sepanjang masa orde baru adalah pembredelan tanpa melalui jalur pengadilan, sehingga alasannya jadi banyak menimbulkan pertanyaan. Walaupun kasus yang lebih kecil seperti pemberian peringatan lebih sering dilakukan. Beberapa tahun lalu tiga media pers yang cukup berpengaruh telah dibatalkan ijin terbitnya yaitu: Editor, Detik, Tempo (Hill, 1994). Pembatalan ini dinilai oleh para ahli sebagai matinya kehidupan demokrasi Indonesia, karena fungsi kritik pers sebagai penyeimbang kehidupan sistem politik dimatikan.

Nilai berita dalam dunia pers merupakan kata kunci untuk menempatkan pers sebagai napas kehidupan demokrasi suatu sistem politik. Nilai berita ini merupakan juga pedoman para wartawan menyeleksi dan membangun sebuah berita. John Hartley mengutip hasil penelitian Galtung dan Ruge mengenai keadaan yang harus dipenuhi sebagai syarat pemilihan peristiwa untuk berita. Pola ini menganut pola nilai berita. Nilai-nilai berita umum tersebut adalah:

1. Frekuensi, merupakan rentang waktu pengambilan suatu peristiwa.
2. Permulaan, atau ukuran suatu peristiwa. Terdapat permulaan di mana suatu peristiwa tidak akan diulas seluruhnya (hal ini berkaitan dengan intensitas misalnya untuk ukuran suatu instansi, kategori berita lokal atau nasional).
3. *Unambiguities*, atau tidak mengandung makna ganda. Berita harus disajikan dengan jelas sehingga kemungkinan makna ganda dapat diperkecil.
4. Memiliki arti, terdiri dari (a) kedekatan budaya, yaitu peristiwa yang serasi dengan latar belakang budaya dari berita-berita yang dikumpulkan akan terlihat lebih berarti dari pada yang lain; (b) relevan atau berhubungan dengan khalayak, yaitu peristiwa-peristiwa yang jauh dari budaya, kelas atau wilayah namun patut dijadikan berita jika mengenai budaya khalayak.
5. Kecocokan (kesesuaian). Maksudnya, peristiwa yang dapat diramalkan atau yang diinginkan terjadi. Jika media mengharap sesuatu terjadi,

kemudian sungguh-sungguh peristiwa itu ada.

6. Tidak terduga, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak terduga diramalkan sebelumnya, atau hal yang jarang sekali terjadi, tetapi masih mempunyai arti dan kesesuaian.
7. Kesenambungan, yaitu peristiwa yang ditampilkan akan muncul lagi di lain waktu. Atau dengan kata lain, adanya kelanjutan berita dari suatu peristiwa, meskipun berita itu telah berakhir.
8. Susunan atau campuran, yaitu peristiwa yang terdiri dari campuran berbagai macam peristiwa yang berbeda.

Galtung dan Ruge mengusulkan empat nilai tambahan yang dianut oleh media di negara-negara barat yaitu:

1. Referensi yang dapat dimanfaatkan oleh golongan elite pemerintahan, misalnya cerita tentang perang, pemilihan umum, dan berbagai bencana.
2. Referensi bagi orang-orang penting (tokoh). Karena pertama, tindakan mereka dianggap lebih memiliki pengaruh dari pada kegiatan sehari-hari dari orang awam, barangkali kegiatan tokoh itu akan mempengaruhi hidup kita. Alasan kedua, kegiatan sosial mereka merupakan bentuk kegiatan pelayanan.
3. Personalisasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang nampak merupakan kegiatan masyarakat sebagai individu-individu. Individu masyarakat mudah diketahui atau diidentifikasi dari pada struktur, kekuatan atau institusi (pemerintahan).
4. Keburukan. Berita yang buruk biasanya merupakan berita yang baik karena mengandung unsur *unambiguities*, relevansi (kecocokan), permulaan, frekuensi. (Hartley, 1982)

Pandangan pemerintah mengenai nilai berita lebih besar muatan politiknya, dibanding dengan pandangan wartawan maupun editor sebuah surat kabar. Pilihan atas peristiwa yang mengandung nilai berita ini merupakan konflik kepentingan kedua belah pihak. Dalam sistem politik Indonesia, regim menjadi penguasa tunggal atas pemuatan berita yang menyangkut kekuasaan di tingkat tertinggi. Seperti dalam kasus-kasus pemberedelan biasanya menyangkut peristiwa berita yang berhubungan dengan lembaga

kepresidenan. Padahal menurut pandangan pers, kandungan nilai berita dari peristiwa yang dipertentangkan dengan penguasa itu adalah besar. Persoalan ini merebak menjadi persoalan independensi editorial sebuah surat kabar, bagaimana seharusnya pers yang hidup di tengah hegemoni penguasa agar tetap eksis tetapi tidak mengurangi "vigour" editorial.

V. METODE

Penghimpunan data penelitian dilakukan dengan metode analisis isi terhadap surat kabar. Studi ini dikembangkan oleh Laswell, dengan menggunakan tehnik yang disebut "symbol coding", yaitu mencatat lambang-lambang atau pesan secara sistematis untuk kemudian diberi interpretasi.

Studi ini akan digabungkan dengan studi wacana untuk memperdalam makna interpretasi yang berusaha mengkaitkan berita dengan lingkungan pada saat peristiwa berita terjadi.

5.1. Populasi

Populasi penelitian adalah berita-berita kampanye pemilu 1997 sepanjang masa kampanye antara tanggal 27 April hingga 23 Mei 1997 dan diliput surat kabar yang terbit di Jawa Tengah dan DIY, dalam hal ini Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan Berita Nasional. Pertimbangannya, ketiga surat kabar tersebut dikategorikan surat kabar tua di Indonesia dan berpengaruh di daerah penelitian. Juga menyangkut pemilik modal dan visi akan banyak memberikan pengaruh kepada kebijakan redaksional.

5.2. Unit analisis

Sebagai dasar unit analisis dibentuk *unit coding*, yang merupakan bagian terkecil dari suatu unit analisis dan akan diberikan skor. Untuk kepentingan penelitian ini digunakan tiga jenis unit analisis yaitu kata, tema dan karakter.

Tema merupakan suatu kalimat sederhana, atau suatu pernyataan yang tegas tentang sesuatu hal. Jadi merupakan kalimat-kalimat sederhana yang muncul sebagai *head-lines* atau kepala berita maupun Tubuh Berita ("Body Text") dalam setiap liputan mengenai kampanye pemilu 1997 dalam setiap penerbitan ketiga surat kabar yang diteliti. Dengan sendirinya materi menyangkut semua bentuk tulisan dan berita yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Unit analisis lain yang diteliti adalah karakter, yaitu semua informasi yang relevan dan yang menggambarkan sifat seorang tokoh atau penggambaran suatu sifat yang mewakili suatu kelompok, atau kedaerahan tertentu yang diliput surat kabar yang menjadi populasi penelitian.